

# Jender Dalam Politik Partai

*By* Ari Darmastuti

---

WORD COUNT

5095

TIME SUBMITTED

14-OCT-2019 10:40AM

PAPER ID

51151018

# **JENDER DALAM POLITIK PARTAI-PARTAI**

## **Studi tentang Pengarusutamaan Jender dalam Lingkup Politik Partai-Partai di Provinsi Lampung**

(Gender in Party Politics, a Study towards Gender Mainstreaming in the Politics of Political Parties in Lampung Province)

ARI DARMASTUTI

### **ABSTRACT**

The objectives of this research were to figure out: (1) political parties' ideologies concerning political empowerment of women; (2) party officers' perspective regarding political empowerment of women; (3) parties' effort to empower women politically; (4) constraints of the parties to conduct women political empowerment; (5) cooperation among women groups to strengthen women political empowerment; (6) the performance of woman politicians to articulate women's political interests.

The research was conducted towards several groups in Lampung Province which were parties from three spectrums of ideology (center, right and left), woman NGOs, women members of parliament, and member of Gender and Development study group of the University of Lampung. Data were collected using depth interview method. Data were then analyzed using structural actantial method from A.J Greimas by studying structural relationship of subject-actor, sender-receiver, helper-blocker, and the situation of the women political empowerment.

The results show that: (1) parties' ideological positions were not yet gender sensitive; (2) parties did not yet perform specific affirmative actions to help empower women politically; (3) parties' officers have acted as anti-subject towards women seeking legislative candidacy; (4) efforts which have been performed by the political parties to help women seeking candidacy were for example by not asking the women to contribute a lot of money to the party to run the candidacy and by encouraging the women to develop cooperative efforts; (5) the elected women were quite good in performing articulative functions, and (6) four women informants were political subjects since all of women succeed in making legislative candidacy; three of them succeed in getting elected, however all of them were constrained by anti-subject in performing their function as representatives.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) posisi ideologis partai tentang pemberdayaan politik perempuan; (2) perspektif pengurus partai politik terhadap pemberdayaan politik perempuan; (3) upaya partai dan pengurus partai politik dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan; (4) hambatan-hambatan partai dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan; (5) kerjasama diantara kelompok-kelompok perempuan dalam mendorong pemberdayaan politik perempuan; (6) kinerja perempuan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan.

Penelitian ini terhadap beberapa kelompok di Provinsi Lampung yang meliputi partai-partai dari berbagai jenis ideologi politik dalam kelompok yang sedikit ke kiri, tengah dan kanan; LSM perempuan; kelompok perempuan anggota legislatif, serta Kelompok Kajian Jender dan Pembangunan, FISIP, Universitas Lampung. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview mendalam (*depth interviews*) dengan beberapa informan kunci dari masing-masing kategori kelompok. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis struktural aktantial dari A.J. Greimas terutama dengan mengkaji hubungan struktur poros subyek- pelaku, pengirim-penerima, penolong-penghambat, serta situasi yang terbentuk dalam pemberdayaan politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) posisi ideologis partai belum sepenuhnya menunjukkan sensitifitas jender, yaitu belum dengan tegas mengatur kewajiban keterwakilan politik perempuan dalam konstitusi partai, menjadi penyebab utama belum tercapainya keterwakilan politik 30% bagi perempuan; (2) Akibat posisi ideologis seperti pada poin di muka, maka partai belum melakukan *affirmative action* (terutama memasukkan perempuan dalam struktur pengurus harian partai dan dalam daftar calon jadi) untuk membantu perempuan mencapai keterwakilan politik 30; (3) Dengan mewajibkan perempuan berkompetisi penuh dalam pemilu, dengan pandangan yang masih menganggap perempuan tidak mampu berpolitik, tidak "menowel" ormas perempuan untuk rekrutmen (sementara menggunakan ormas lain untuk dasar rekrutmen laki-laki), maka pengurus partai telah berperan sebagai "anti subyek" bagi para perempuan yang berusaha masuk menjadi calon dari partai; (4) upaya partai yang dapat disebut sebagai menolong perempuan mendapatkan pencalonan dan terpilih dalam pemilu antara lain adalah tidak membebani perempuan calon dengan kewajiban berat untuk menyeter dana pemilu ke partai dan mendorong kerjasama antar calon dalam kampanye pemilu; (5) perempuan yang terpilih dalam pemilu dan menjadi anggota legislatif dinilai belum menunjukkan kinerja (berupa keterwakilan kepentingan politik perempuan) yang baik. Penyebabnya adalah faktor internal kemampuan dan kualitas pribadi yang belum baik, ketiadaan jaringan pendukung dan hambatan dari partai dan fraksi. Dalam hal ini partai dan fraksi sekali lagi berperan sebagai anti subyek bagi para perempuan anggota legislatif untuk dapat mencapau obyeknya, yaitu keterwakilan politik perempuan; (6) penelitian ini menunjukkan bahwa *keempat politisi perempuan* yang menjadi informan penelitian *adalah subyek*, bukan obyek, karena keempatnya *mempunyai potensi (berhasil)* untuk masuk dalam daftar calon, *tiga punya potensi (berhasil) terpilih*, tetapi *ketiganya terhalang oleh anti subyek dan terhambat oleh faktor penghambat dalam mencapai obyek ketiga* (yaitu keterwakilan politik perempuan).

## PENDAHULUAN

Tuntutan perempuan Indonesia untuk mendapat perwakilan yang memadai dalam dunia politik telah mengundang perdebatan yang cukup kontroversial di kalangan masyarakat luas. Argumen yang dilontarkan cukup beragam, dari argumen yang sepenuhnya mendukung gagasan ini, sampai gagasan yang menyatakan bahwa perempuan harus dibiarkan bersaing secara terbuka dengan laki-laki dan juga argumen bahwa debat soal perwakilan politik perempuan semata-mata adalah kepentingan elit perempuan karena debat tersebut tidak berhubungan dengan kebutuhan mendasar yang dirasakan kebanyakan perempuan, seperti masalah kemiskinan, kesehatan, kebodohan dan

sebagainya. Menurut pasal 65 Undang-Undang nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum telah menjamin bahwa setiap partai politik peserta pemilu semestinya dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, pada kenyataannya jumlah perempuan sebagai politisi masih rendah.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik bertentangan dengan Prinsip Keempat Deklarasi Semesta tentang Demokrasi dan Pasal 7 (b) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Rendahnya keterwakilan politik perempuan bukan semata-mata variabel independen yang akan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan publik (negara). Namun dia juga adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh banyak variabel-variabel lainnya, baik variabel yang datang dari diri pribadi perempuan sendiri maupun dari variabel-variabel sosial obyektif. Beberapa penelitian (Yonalita Vevia, 2003; Nia Maesyarah, 2004; Sumarlen, 2004; M. Deden Lily QZ, 2004) mengkonfirmasi hal ini.

Sementara itu makna penting keberadaan perempuan dalam dunia politik tidak dapat dikesampingkan. Survei yang dilaksanakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU/Organisasi Parlemen Se Dunia) dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat keyakinan yang tinggi bahwa kehadiran perempuan dalam jumlah yang memadai di dalam kehidupan politik, dan terutama dalam lembaga yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan penting untuk membuat keputusan politik (yaitu parlemen) akan merubah beberapa aspek penting terkait dengan kehidupan politik (IPU, 1999 dan IPU, 2000: 15-67), antara lain praktek politik, keyakinan masyarakat akan proses politik, kebiasaan dalam partai politik, prioritas dan hasil-hasil politik dan sebagainya.

Penelitian ini mengambil asumsi awal bahwa peran politik perempuan dalam partai politik dan lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan politik terbesar merupakan sebuah fenomena yang bersifat multi dimensi. Joni Lovenduski dan Pippa Norris (1993) menyatakan bahwa perempuan telah mampu memperoleh hak pilih semenjak akhir abad 19, pada dekade 1960-1970-an berjuang memperoleh hak azasi dan h, pada dekade 1960-1970-an berjuang memperoleh hak azasi dan hakempuan, serta tahun 1980-an berjuang memperoleh hak-hak politik yang lebih luas dari sekedar hak pilih.

Variabel-variabel yang mempengaruhi rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif adalah (Lovenduski dan Norris, 1993: 309-358) berasal dari sistim politik (meliputi sub variabel budaya politik, sistim pemilu, sistim kepartaian, dan tingkat keketatan kompetisi legislatif); kompetisi partai (meliputi sub-sub kenaikan kompetisi dan munculnya partai-partai baru membuka peluang bagi perempuan); konteks partai (partai kiri lebih membuka peluang untuk perempuan, sistim rekrutmen dalam partai); kompetisi partai-partai (persaingan terbuka membuat perempuan sulit bersaing, semakin banyak kursi yang diperebutkan memberi kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk terpilih).

Secara khusus budaya politik dalam partai dijelaskan menggunakan teori antropologi politik. Dengan menggunakan analogi penjelasan Sulistyowati Irianto dalam penelitiannya (Sulistyowati Irianto, 2003: 24-26) maka pendekatan antropologi politik dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana politik bekerja pada sub-sub kelompok (partai politik dan kelompok perempuan yang masing-masing mempunyai pandangan "ideologis", strategi dan taktik berbeda dalam perjuangannya, karena

diasumsikan memang kelompok-kelompok tersebut berbeda). Karena itu, perbedaan dan keunikan sub-sub kelompok (partai dan perempuan) akan menjadi fokus kajian studi ini. Referensi lain yang menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan dari berbagai sub kelompok perempuan dapat diperoleh dari tulisan Vicky Randal (1982: 45-71 dan 93-115) yang menggambarkan bahwa *feminist movement* (gerakan feminisme) terdiri dari berbagai kelompok dan bahwa suksesnya juga akan tergantung pada seberapa besar mereka mempunyai keinginan untuk bekerja sama karena *internal conflict in the movement* dalam sejarahnya dapat memperlemah gerakan.

Analisis politik atas keragaman kelompok perempuan hanya dapat dilakukan dengan cara memahami mengenai bagaimana "tradisi" telah berkembang dalam masing-masing sub kelompok perempuan, dan bagaimana mereka memandang sub-kelompok perempuan

15  
Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui posisi ideologis partai tentang pemberdayaan politik perempuan.
2. mengetahui perspektif pengurus partai politik terhadap pemberdayaan politik perempuan.
3. mengetahui upaya partai dan pengurus partai politik dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan
4. mengetahui hambatan-hambatan partai dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan
5. mengetahui kerjasama diantara kelompok-kelompok perempuan dalam mendorong pemberdayaan politik perempuan
6. mengetahui kinerja perempuan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan

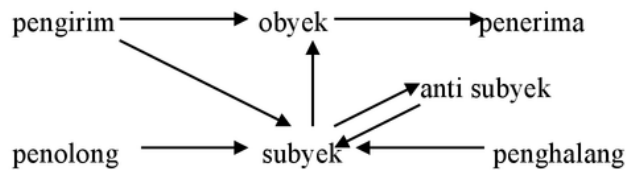
## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan mengambil sub-sub kelompok berupa partai-partai (Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKS dan PAN) guna mewakili berbagai jenis ideologi politik dalam kelompok yang sedikit ke kiri, tengah dan kanan; LSM perempuan (Damar dan KPP Ungu); kelompok perempuan anggota legislatif, serta Kelompok Kajian Jender dan Pembangunan, FISIP, Universitas Lampung. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview mendalam (*depth interviews*) dengan beberapa informan kunci dalam masing-masing kategori dan berhasil dikelompokkan sebagai berikut: (1) 5 orang perempuan politisi dari 3 partai (PDIP, Partai Golkar dan PAN), satu orang sekaligus merangkap sebagai direktur eksekutif LSM Damar; (2) orang laki-laki politisi (Partai Demokrat); (3) 1 orang perempuan dari LSM KPP Ungu; (4) 1 orang akademisi mewakili KKJP FISIP Universitas Lampung.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis struktural aktantial (A.J. Greimas, 1966), terutama dengan mengkaji hubungan struktur poros subyek- pelaku, pengirim-penerima, penolong-penghambat, serta situasi yang terbentuk dalam pemberdayaan politik perempuan

Pola analisis meliputi tiga poros, yaitu (1) poros pencarian ( subyek-----obyek); (2) poros komunikasi (pengirim ----- penerima); (3) poros hubungan kekuatan ( penolong ----- penghambat)

Dalam skema, hubungan antar poros digambarkan sebagai berikut:



Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) *Subyek* adalah orang atau pihak yang mencari obyek; (2) *Pengirim* diterjemahkan sebagai pihak atau aturan atau kondisi yang memberi dasar bagi dicarinya obyek oleh subyek; (3) *Obyek* diterjemahkan sebagai situasi yang diinginkan atau hasil yang ingin dicapai; (4) *Penerima* adalah pihak yang mendapat keuntungan dari dicapainya obyek; (5) *Penolong* adalah kondisi atau aktor yang membantu dicapainya obyek; (6) *Anti subyek* adalah aktor yang menghambat subyek mencapai obyek; (7) *Penghambat* adalah kondisi yang menghalangi subyek mencapai obyek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini tidak berhasil memperoleh data dari seluruh spektrum ideologi partai, terutama partai "ekstrem kanan dan ekstrem kiri", antara lain Partai Buruh Sosial Demokrat dan partai-partai kanan lainnya. Khusus untuk partai-partai kanan (Islam) beberapa penelitian mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP telah dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan tema yang mirip dengan penelitian ini, sehingga data dari mereka dijadikan pembanding dalam analisis, bukan data utama.

### Ideologi dan pandangan terhadap ideologi

Tabel 1 Pandangan informan terhadap ideologi partai-partai

Pandangan terhadap ideologi
1. Partai Golkar tidak berperspektif gender, perempuan dianggap sama dengan laki-laki dalam partai
2. Partai Golkar sudah berperspektif gender karena membentuk divisi khusus perempuan
3. Perempuan tidak dianggap berbeda dengan laki-laki
4. Berperspektif gender, tercantum dalam AD ART
5. Perempuan dianggap dan diperlakukan sama dengan laki-laki dalam Partai Demokrat
6. PDIP lebih terbuka terhadap ide gender dalam politik
7. Masih ada partai yang mensiasati undang-undang
8. Partai-partai masih belum responsif gender

Sumber: diolah dari informasi para informan

Berbeda dengan peneliti lain yang menggunakan dokumen tertulis ideologi partai sebagai indikator untuk melihat apakah sebuah partai responsif gender atau tidak (AD Kusumaningtyas, 2004) atau dengan kata lain menggunakan pendekatan "formal ideology" (ideologi formal yang tertulis), penelitian ini menggunakan pendekatan berbeda, yaitu dengan mengartikan ideologi sebagai "the living ideology" atau ideologi yang benar-benar menjadi pedoman cara pandang, cara sikap dan dan cara tindak.

Dengan mengartikan ideologi dari sisi ideologi yang hidup di partai (bukan ideologi yang secara formal diakui oleh partai) maka penelitian ini menunjukkan bahwa partai-partai mengembangkan ideologi yang berbeda-beda dalam mengakomodasi tuntutan keterwakilan politik perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya perbedaan yang jelas dalam hal cara pandang para informan tentang ideologi yang dikembangkan oleh partai-partai dalam merespon tuntutan keterwakilan politik bagi perempuan. Terdapat tiga politisi partai yang menyatakan bahwa partai "tidak membedakan laki-laki dengan perempuan". Dalam perspektif jender, jelas cara pandang partai seperti ini adalah disebut dengan buta jender atau "*gender blind*" karena tidak mampu melihat perbedaan perempuan dengan laki-laki dan mencerminkan perbedaan itu dalam aturan organisasi. Terdapat satu orang politisi partai yang dengan tegas menyatakan "partai tidak berperspektif jender karena menyamakan perempuan dengan laki-laki". Pandangan ini jelas merupakan kebalikan asumsi pertama, justru karena partai menganggap perempuan sama dengan laki-laki maka partai tidak berperspektif jender. Seorang politisi partai lainnya menyatakan partai sudah berperspektif jender, terlihat dari AD ART partainya sendiri, dan seorang lagi menyatakan sudah lebih responsif jender. Sementara itu satu akademisi menyatakan partai-partai belum responsif jender dan satu orang dari LSM menyatakan masih banyak partai mensiasati undang-undang untuk menghindar dari kewajiban memenuhi keterwakilan politik bagi perempuan 30%.

Data di muka menunjukkan bahwa: (1) mayoritas partai belum sensitif jender dalam konstruksi ideologi partai; (2) di kalangan politisi perempuanpun, kesadaran bahwa perempuan harus diasumsikan berbeda dari laki-laki dan mendapat perlindungan dalam konstitusi partai belum sepenuhnya disadari; (3) terdapat satu partai yang dianggap responsif jender; (4) terdapat satu partai yang dianggap lebih terbuka terhadap ide gender dalam politik.

### **Kebijakan partai dalam merespon tuntutan keterwakilan politik perempuan**

Tabel 2 Pendapat informasi tentang kebijakan partai dalam merespon tuntutan

1. tidak ada perlakuan khusus untuk mencapai keterwakilan 30%, perempuan harus berkompetisi secara penuh dengan laki-laki, dicalonkan berdasarkan posisi dalam kepengurusan partai, harus menunjukkan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela), partai belum adil dalam memberi porsi posisi satu (terpilih) kepada perempuan calon anggota legislatif
2. Partai Golkar membentuk bagian pemberdayaan perempuan dan menuntut perempuan untuk berperan maksimal sebelum dicalonkan
3. PDIP menuntut kualitas sebagai persyaratan, UU pemilu memperkuat sikap PDIP untuk memberdayakan perempuan, 15% kursi di semua tingkatan kepengurusan harus diisi perempuan, dan harus diisi, PDIP mendorong perempuan untuk mengisi jabatan publik lainnya, PDIP membuat diklat khusus untuk melatih ketrampilan berpolitik bagi perempuan, PDIP mencari tokoh-tokoh perempuan secara terbuka (dari ormas, LSM akademisi, wartawan, agama)
4. PAN mengharuskan keterwakilan 30% di tingkat kepengurusan apapun (tetapi belum tercapai).
5. Partai Demokrat belum memiliki strategi untuk mencapai keterwakilan 30%, membentuk bidang yang mengatur dan mengatasi permasalahan perempuan, tidak merasa ada kewajiban meletakkan 30% perempuan sebagai calon karena bahasa dalam UU adalah "dapat"
6. PDIP membuat SK tentang kewajiban adanya perempuan dalam struktur kepengurusan partai, melakukan rekrutmen terbuka untuk menyaring lebih banyak perempuan yang mempunyai potensi (kualitas pribadi dan potensi massa pendukung) dari berbagai latar belakang, tetapi masih mengembangkan budaya yang sulit diikuti perempuan
7. Ybs menganggap bahwa ide keterwakilan politik perempuan dianggap sebagai formalitas oleh partai-partai, partai menempatkan kader perempuan dengan setengah hati, partai KKN sehingga melihat orang tidak obyektif, lebih melihat keluarganya dan orang terdekatnya, partai seharusnya memperhatikan kuota sementara soal kualitas biar nanti diperbaiki perempuan sendiri, partai seharusnya memasukkan perempuan ke dalam struktur kepengurusan partai, partai seharusnya merubah visi misi dan platform
8. Partai tidak memberi kesempatan dan peluang kepada perempuan, kebijakan "setoran sekian persen penghasilan" ke partai menghambat perempuan, ormas-ormas (baik underbouw partai maupun bukan) juga punya kepentingan "setoran", partai dan ormas banyak menitip program dan proyek

Sumber: diolah dari informasi para informan

Partai belum memiliki kebijakan yang dapat mendorong keterwakilan politik perempuan. Hal ini jelas dari pernyataan para informan yang pada intinya adalah tidak adanya perlakuan khusus kepada para caleg perempuan, para caleg perempuan harus berkompetisi penuh dengan para saingan, masih ada partai yang menganggap keterwakilan politik perempuan sebagai formalitas belaka, masih ada partai yang menganggap bahwa membentuk divisi khusus perempuan berarti memberdayakan perempuan secara politik, bahkan ada yang meminta "setoran" kepada para politisi perempuan, atau menyibukkan perempuan anggota legislatif dengan "titipan-titipan program dan proyek". Meski demikian perlu dicatat bahwa sudah terdapat partai yang melakukan tindakan khusus misalnya membuka rekrutmen politik untuk memperluas segmen rekrutmen, dan memberi dorongan bagi kerjasama caleg.

Dengan tidak memberikan dorongan kepada perempuan untuk dapat berperan maksimal dan menuntut perempuan berkompetisi secara penuh dengan caleg lain, maka kecenderungan yang terjadi adalah partai-partai belum memiliki kebijakan *affirmative action* yang jelas, apalagi kebijakan *possitive discrimination*.

### **Sikap Pengurus Partai Politik**

Tabel 3 Pandangan informan tentang sikap pengurus partai politik



1. belum "menowel" perempuan dari ormas perempuan, masih menganggap perempuan politisi sebagai "tidak kapabel", masih menganggap bahwa politik adalah "domain" laki-laki
2. tidak memperlakukan perempuan berbeda dari laki-laki, menuntut perempuan "bermain dalam ranah laki-laki"
3. tidak membedakan laki-laki dengan perempuan, menuntut perempuan mampu menunjukkan kualitas diri, tidak berbeda dengan kebijakan partai dalam menuntut kualitas perempuan
4. pengurus yang dulu sangat menghargai dan memperhitungkan perempuan, obyektif dalam menilai perempuan calon, mendorong kerjasama diantara para calon tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, serta tidak mengutip biaya dari calon; pengurus yang sekarang menggeser "kehendak Amin Rais" dalam hal keterwakilan perempuan
5. Masih kental stereotip gender, menganggap sumberdaya manusia perempuan masih kurang, menghendaki perempuan menyesuaikan diri dengan kultur partai, belum semuanya memahami makna keterwakilan politik perempuan
6. Belum semuanya paham makna keterwakilan politik perempuan meski pada umumnya tau tentang angka 30%, Belum memenuhi kebutuhan strategis perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam mengontrol kebijakan, masih terjebak pada memenuhi kebutuhan praktis partisipasi, belum melakukan *affirmative action* misalnya dengan memberi angka bonus khusus untuk caleg perempuan
7. melakukan PAW terhadap perempuan dengan mengganti dengan keluarganya, yang patriarkhis tidak sedikit, masih menganggap perempuan kurang mampu
8. menitip program dan proyek serta meminta "setoran" dari anggota dewan

Sumber: diolah dari informasi para informan

Sikap pengurus partai seperti tercermin dalam tabel di muka menunjukkan bahwa para pengurus partai di tingkat Provinsi justru memperburuk kebijakan partai; hal ini terlihat jelas dalam kasus PAN. Dalam penelitian yang lain (Nia Maesyaroh, 2004) PAN Provinsi sudah pernah menyusun rencana skema *possitive discrimination* dengan cara memberi angka pokok sebagai modal evaluasi kepada para perempuan calon dalam screening partai. Tetapi kebijakan ini tidak diadopsi oleh para "pen- screen" yang semuanya laki-laki. Dalam tabel di muka, pergantian pengurus pada tahun 2005 diperkirakan akan memperburuk kondisi ini karena kuatnya pengaruh lingkaran di sekitar elit pengurus PAN Provinsi.

Ketidaksediaan pengurus partai memperluas segmen rekrutmen di luar pengurus inti partai juga mempersempit peluang perempuan untuk dapat direkrut sebagai calon legislatif karena perempuan pada umumnya tidak duduk dalam kepengurusan inti partai. Pendekatan para pengurus partai ini bertabrakan dengan keinginan perempuan politisi yang pada umumnya dipengaruhi ideologi feminisme liberal yang pada intinya adalah menuntut adanya kebijakan dan aturan partai yang jelas yang memihak perempuan (para politisi perempuan ini antara lain menghendaki adanya perluasan segmen rekrutmen, serta pemberlakuan *possitive discrimination* yang jelas oleh partai karena kondisi perempuan yang pada umumnya tidak memungkinkan mereka dapat bersaing secara wajar dengan laki-laki).

### **Keberadaan perempuan politisi**

Sementara itu, terdapat tiga alasan utama yang pada umumnya dianggap penting oleh para informan bagi diperlukannya perempuan dalam kehidupan politik, yaitu:

1. mewakili jumlah perempuan (soal kuantitas)

2. mewakili pandangan, kepentingan, sikap dan perilaku perempuan agar masuk dalam kebijakan politik dan agar dapat mewarnai kehidupan politik sehari-hari di partai dan parlemen (soal kualitas).
3. demokrasi adalah milik semua orang, termasuk perempuan (soal argumen demokrasi)

Meski demikian misi keberadaan perempuan di dunia politik ini masih terhambat oleh banyak faktor, antara lain:

1. kelemahan perempuan politisi sendiri yang belum mempunyai kemampuan argumentatif yang baik, belum memiliki kemampuan dan kesadaran yang kuat untuk memperbaiki diri, belum memiliki keberanian yang kuat untuk berkompetisi dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan kesejahteraan masyarakat, masih terkooptasi oleh garis dan kepentingan partai dan fraksi.
2. jaringan di antara kelompok perempuan: (a) belum menjadi *supporting sytem* yang menyediakan *supply pool* yang memadai untuk rekrutmen, (b) belum mempunyai dukungan administrasi untuk mendukung para politisi perempuan mempertajam prioritas perjuangan, serta (c) belum menyediakan program pelatihan yang mantap bagi para perempuan calon politisi.
3. faktor eksternal terutama hambatan dari partai yang masih kental gender stereotyping-nya.

#### **Hasil sebagai politisi perempuan**

Dari informasi yang diberikan oleh informan, beberapa hal yang dapat disebut sebagai hasil perjuangan para politisi perempuan adalah:

1. Berhasil membuka wacana tentang hak perempuan dalam kehidupan politik ketika saat bersama-sama komponen perempuan lainnya di Provinsi Lampung membangun Koalisi Perempuan Lampung, membentuk Kaukus Perempuan Politik Lampung, sehingga isu keterwakilan politik perempuan menjadi isu yang dikenal luas oleh masyarakat, terutama oleh partai-partai politik.
2. Membangun jaringan Persatuan Perempuan Parlemen Lampung (P3L) yang berupa perempuan anggota parlemen di DPRD Provinsi Lampung Periode 2004-2009 untuk memaksimalkan potensi perempuan yang hanya sedikit jumlahnya. Keberadaan P3L tidak terpengaruh oleh konflik politik antar Partai Politik di Lampung dan antar Fraksi di DPRD Provinsi Lampung terkait konflik Pemilihan Gubernur yang telah terjadi sebelumnya.
3. Meski secara kuantitatif (jumlah anggota) dan kualitatif (pengaruh terhadap kebijakan) belum memenuhi target, tetapi pengaruh terhadap atmosfer politik di DPRD dirasakan, terbukti dengan dipercayanya perempuan untuk memimpin sidang yang diperkirakan "akan panas".

#### **Subyek dan obyek dalam hubungan perempuan dengan partai**

Studi struktur wacana pada umumnya dilakukan terhadap teks yang bersifat naratif, baik berupa novel, cerpen, atau naskah drama. Untuk memudahkan analisis, pada umumnya teks naratif dibagi dalam episode-episode, baik episode waktu maupun kejadian. Studi tentang gender dalam politik partai-partai di Provinsi Lampung ini menjadikan naskah hasil wawancara sebagai wacana yang menyerupai naskah dialog dalam drama, dan membaginya dalam tiga episode utama, yaitu episode pra pencalonan ke pencalonan,

episode pemilihan dan episode pasca pemilihan (saat menjadi anggota DPRD). Pembagian episode ini dianggap penting karena hubungan subyek-obyek tidak bersifat tunggal dalam arti bisa berubah-ubah pada masing-masing episode.

Untuk menguji siapa yang menjadi subyek pada tiap episode digunakan *tes kualifikasi*, yaitu tes untuk mengetahui siapa yang mempunyai potensi. Untuk menguji apakah subyek berhasil mencapai tujuannya digunakan *tes performance* (kemampuan atau penampilan), dan untuk menguji apakah kemampuan itu diakui atau tidak digunakan *tes pujian* yang berupa pengakuan sosial.

#### **(a) Episode pra pencalonan ke pencalonan**

Dalam episode ini subyek yang digambarkan oleh para informan adalah para perempuan yang mencari kesempatan untuk dicalonkan oleh partai, Berarti *subyek* adalah *para perempuan yang mencari kesempatan untuk dicalonkan*. *Obyek* dalam episode ini adalah *pencalonan oleh partai*. Pihak yang menghalangi para perempuan mencapai pencalonan adalah para pengurus partai, dengan demikian *para pengurus partai* adalah *anti-subyek*. Hal yang menyebabkan perempuan ramai-ramai mencari pencalonan di pemilihan umum adalah karena adanya ketentuan tentang “kuota” 30% keterwakilan perempuan dalam Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Dengan demikian *pengirim* dalam episode ini adalah *Pasal 65 ayat 1 UU Pemilu* tersebut. Dalam hasil wawancara, informan yang berstatus sebagai politisi menyatakan bahwa mereka ikut pencalonan karena memiliki kesadaran bahwa politik adalah hak mereka juga, karena itu *pengirim lainnya* adalah *kesadaran politik individu perempuan yang mencari kesempatan untuk dicalonkan* itu sendiri. Pihak *penerima* dalam episode ini adalah *perempuan yang mencari kesempatan untuk dicalonkan*. Meski demikian terdapat *penerima lain* yaitu *perempuan yang lebih luas (koalisi, kaukus maupun perempuan di luar)* karena informasi menggambarkan bahwa kalau penerima utama mendapatkan obyek (dicalonkan), maka perempuan yang lebih luas akan mendapat manfaat. Pihak yang membantu subyek memperoleh obyek digambarkan sebagai koalisi, kaukus, dan dorongan pengurus partai yang sadar pentingnya peran politik perempuan. Dengan demikian *penolong* adalah *koalisi, kaukus, dan pengurus partai yang sadar pentingnya mempertimbangkan aspek jender dalam politik*. Sementara itu penghalang atau faktor yang menghambat adalah ketidak beranian perempuan, budaya yang menghalangi, serta sedikitnya jumlah perempuan yang dapat direkrut. *Penghambat*, dengan demikian, adalah *ketidakberanian, budaya yang menghalangi serta sedikitnya jumlah yang dapat direkrut*.

Pertanyaan dalam episode ini adalah apakah subyek berhasil mencapai obyek? Keempat politisi perempuan yang diwawancarai semuanya berhasil mencapai obyek, yaitu dicalonkan dalam pemilu legislatif. Tidak terdapat informasi mengenai subyek yang tidak berhasil mencapai obyek.

#### **(b) Episode pemilihan**

Dalam episode ini *subyek* adalah tetap *perempuan*, tetapi saat ini dia *berusaha agar terpilih*, dan *obyeknya* adalah *terpilih dalam pemilu*. Dalam episode ini *tidak terdapat anti subyek* karena tidak ada pihak yang menghalangi subyek mencapai obyek. Meski demikian terdapat *penghambat* yaitu *pemilih perempuan yang belum tentu memilih perempuan calon, kemampuan keuangan terbatas yang membuat perempuan calon sulit*

*menjangkau pemilih dalam jumlah banyak. Sementara itu penolong adalah semangat dan kerja keras perempuan yang berusaha agar terpilih, serta dorongan partai untuk kerjasama antar calon. Pengirim yang membuat subyek mencari obyek adalah pencalonan oleh partai, dan penerima adalah perempuan yang berusaha agar terpilih. Terdapat penerima lain yaitu perempuan yang lebih luas (koalisi, kaukus maupun perempuan di luar) karena dalam wacana informasi para informan digambarkan perempuan yang lebih luas ini akan mendapat manfaat jika subyek berhasil mencapai obyek (terpilih dalam pemilu).*

Pertanyaan utama dalam episode ini adalah apakah subyek berhasil mencapai obyek? Paparan informan menunjukkan bahwa tiga dari empat subyek berhasil mencapai obyek, yaitu terpilih dalam pemilu.

### **(c) Episode pasca pemilihan**

*Pada tahap ini subyek tetap perempuan, tetapi saat ini berusaha mewakili kepentingan perempuan. Obyek dalam episode ini adalah keterwakilan kepentingan perempuan. Terdapat penghalang yang membuat subyek tidak dapat mencapai obyek, yaitu ketidakmampuan subyek berargumentasi, ketidakmampuan subyek merespon masalah-masalah yang terkait dengan perempuan, kinerja jaringan perempuan yang masih sporadis dan tidak terprogram, ketiadaan komunikasi terus-menerus dengan kelompok jaringan, ketiadaan dukungan staf administrasi jaringan yang dapat membantu mempertajam prioritas untuk diperjuangkan., banyaknya titipan program dan proyek dari pengurus partai dan dari ormas pendukung. Dalam episode ini, partai dan fraksi kembali digambarkan sebagai anti subyek karena atas nama disiplin partai dan fraksi menjadi pihak yang menghalangi perempuan anggota legislatif memprioritaskan keterwakilan kepentingan perempuan.*

## **SIMPULAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) posisi ideologis partai tentang pemberdayaan politik perempuan; (2) perspektif pengurus partai politik terhadap pemberdayaan politik perempuan; (3) upaya partai dan pengurus partai politik dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan; (4) hambatan-hambatan partai dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan; (5) kerjasama diantara kelompok-kelompok perempuan dalam mendorong pemberdayaan politik perempuan; (6) kinerja perempuan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan

Dengan tujuan penelitian seperti tersebut di muka, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Posisi ideologis partai belum sepenuhnya menunjukkan sensitifitas jender, yaitu belum dengan tegas mengatur dalam konstitusi partai tentang kewajiban keterwakilan politik perempuan; (2) akibat posisi ideologis seperti pada poin di muka, maka partai belum melakukan *affirmative action* (terutama memasukkan perempuan dalam struktur pengurus harian partai dan dalam daftar calon jadi) untuk membantu perempuan mencapai keterwakilan politik 30%; (3) dengan mewajibkan perempuan berkompetisi penuh dalam pemilu, dengan pandangan yang masih menganggap perempuan tidak mampu berpolitik, tidak "menowel" ormas perempuan untuk rekrutmen (sementara menggunakan ormas lain untuk dasar rekrutmen laki-laki), maka pengurus

partai telah berperan sebagai "anti subyek" bagi para perempuan yang berusaha masuk menjadi calon dari partai; (4) upaya partai yang dapat disebut sebagai menolong perempuan mendapatkan pencalonan dan terpilih dalam pemilu antara lain adalah tidak membebani perempuan calon dengan kewajiban berat untuk menyetor dana pemilu ke partai dan mendorong kerjasama antar calon dalam kampanye pemilu; (5) perempuan yang terpilih dalam pemilu dan menjadi anggota legislatif dinilai belum menunjukkan kinerja (berupa keterwakilan kepentingan politik perempuan) yang baik. Penyebabnya adalah faktor internal kemampuan dan kualitas pribadi yang belum baik, ketiadaan jaringan pendukung dan hambatan dari partai dan fraksi. Dalam hal ini partai dan fraksi sekali lagi berperan sebagai anti subyek bagi para perempuan anggota legislatif untuk dapat mencapai obyeknya, yaitu keterwakilan politik perempuan; (6) penelitian ini menunjukkan bahwa *keempat politisi perempuan* yang menjadi informan penelitian *adalah subyek*, bukan obyek, karena keempatnya *mempunyai potensi (berhasil)* untuk masuk dalam daftar calon, *tiga punya potensi (berhasil) terpilih*, tetapi *ketiganya terhalang oleh anti subyek dan terhambat oleh faktor penghambat dalam mencapai obyek ketiga* (yaitu keterwakilan politik perempuan).

Terlepas dari dapat dijawabnya masalah dan dicapainya tujuan penelitian, penelitian ini masih mempunyai banyak *kelemahan*, yaitu *pertama*, belum dapat terwakilinya seluruh spektrum ideologi partai yang diteliti. *Selain itu*, penelitian ini juga belum mampu mengungkap secara tuntas jenis-jenis feminisme yang diyakini dan diperjuangkan oleh para politisi perempuan. *Ketiga*, atmosfir partai yang tadinya diharapkan dapat digali dalam penelitian melalui metode observasi juga tidak berhasil dilaksanakan berhubung dengan singkatnya waktu studi lapang yang dimiliki peneliti. Kelemahan-kelemahan ini diharapkan dapat membuka peluang penelitian lebih lanjut oleh rekan-rekan peneliti yang lain yang berminat meneliti tentang hubungan jender dan politik.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Apter, David E. , 1985, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung, 2000, *Profil Perempuan Propinsi Lampung 2000*
- Darmastuti, Ari dan Ikram, 1997, *Konsep dan Implikasi Jender*, Seri Monografi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
- Darmastuti, Ari dan Erna Rochana, 2000. *Profil Potensi, Peran dan Sumbangan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat di Wilayah Pesisir*, Technical Report, Proyek Pesisir Lampung
- Darmastuti, Ari, 2001, *Gender dalam Pembuatan Keputusan Keluarga dan Masyarakat (Studi di desa Tejang Pulau Sebesi, Rajabasa, Lampung Selatan)*, Technical Report, Proyek Pesisir Lampung
- Davis, Angela Y, *Women, Culture, Politics*, Vintage Books, a Division of Random House, Inc, New York.
- Greene, Myra Marx dan Beth B. Bess, 1985, *Controversy and Coalition: the New Feminist Movement*, G.K. Hall & Company.
- Greimas, A.J. 1966. *Structural Semantics. An Attempt at a Method*. University of

Nebraska Press. Nebraska

Ikram dan Erom Djuhendard, 2003, *Aksi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di 4 (empat) Pusat Studi Wanita dan 6 (enam) Organisasi Perempuan se Sumbagsel)*, dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 5 No.1 Maret 2003

6 Inter Parliamentary Union, 1999, *Participation of Women in Political Life*, Geneva.

1 Inter Parliamentary Union, 2000, *Politics: Women's Insight*, Geneva.

Irianto, Sulistyowati. 2003. Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum. Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Penyelesaian Sengketa. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta  
*Jurnal Perempuan* nomor 07, Mei-Juli 1998. *Politik Bergejolak, Perempuan Di Mana?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....19, 2001, *Perempuan Dalam Kewarganegaraan, Di Mana?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

.....24/2002, *Perempuan dan Lansia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....27/2003, *Perempuan di Pertambangan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....30/2003, *Perempuan Dalam Sastra*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....31/2003, *Perempuan dan Poligami*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta,

.....32/2003, *Perempuan dan Fundamentalisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....33/2003, *Perempuan di Wilayah Konflik*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....35/2004, *Halo Senayan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

.....36/2004, *Perempuan dan Trafficking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....37/2004, *Perempuan dan Media*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....38/2004, *Perempuan dan Pornografi*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

12 Jakarta.

Lovenduski, Joni dan Norris, Pippa. 1993. *Gender and Politics*. Sage Publications.

Randal, Vicky, 1987, *Women and Politics, An international Perspective*, the University of Chicago Press.

Siswoyo, Hamdani dan Ari Darmastuti, 2000, *Profil Statistik Jender Provinsi Lampung*, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, BPS, dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, Jakarta

### Undang-Undang

1. Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
2. Undang-undang nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum

Skripsi:

- Fitri, Aulia. 2003. Efektivitas Kinerja Perempuan Anggota Legislatif dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik (Studi di DPRD Provinsi Lampung periode 1999-2004)
- Lily Qz. M.Deden. 2004. Dampak Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 terhadap Penempatan Calon Anggota Legislatif dari Partai politik yang Berazaskan Islam (studi di DPW PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA).
- Maesyroh, Nia, 2004. Diskriminasi Gender dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di PAN (Studi di DPW PAN Lampung)
- Rahayu, Sri, 2003. Peranan DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di Sektor Pemberdayaan Perempuan (Studi di DPRD Kota Bandarlampung)
- Sumarlen, 2004. Peran Perempuan dalam Pengambilan keputusan politik (studi di DPW PKB di Provinsi Lampung).
- Vevia, Yonalita, 2003. Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Pengurus Partai-Partai Politik Islam (studi pada DPC PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Bandarlampung)

# Jender Dalam Politik Partai

## ORIGINALITY REPORT

4%

### SIMILARITY INDEX

#### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://sidauruk276.blogspot.com">sidauruk276.blogspot.com</a> Internet	28 words — 1%
2	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	28 words — 1%
3	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	18 words — < 1%
4	<a href="http://www.crc.uri.edu">www.crc.uri.edu</a> Internet	17 words — < 1%
5	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	17 words — < 1%
6	<a href="http://www.aegean.gr">www.aegean.gr</a> Internet	16 words — < 1%
7	<a href="http://list.msu.edu">list.msu.edu</a> Internet	15 words — < 1%
8	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	15 words — < 1%
9	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
10	Helen Jones. "Working together: local and global imperatives for women in Mongolia", Asia Europe Journal, 2006 Crossref	12 words — < 1%



11	Abraham Nurcahyo. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Crossref	11 words — < 1%
12	<a href="http://www.idea.int">www.idea.int</a> Internet	10 words — < 1%
13	<a href="http://skemman.is">skemman.is</a> Internet	10 words — < 1%
14	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	8 words — < 1%
15	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	8 words — < 1%
16	<a href="http://www.ideaindo.or.id">www.ideaindo.or.id</a> Internet	8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES    ON  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY    ON

EXCLUDE MATCHES    OFF